 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

 **KECAMATAN MANGKUTANA**

 Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973

 Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048

 Email : ……………………….

**KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 16 TAHUN 2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026**

**KECAMATAN MANGKUTANA**

 **KABUPATEN LUWU TIMUR**

**CAMAT MANGKUTANA**

 **KABUPATEN LUWU TIMUR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a.  b. | Dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatn Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu mengubah Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor : 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 Di Lingkungan Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur; |
| Mengingat : | 1.2. | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4270);Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem |

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman petunjuk Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

288);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA NO 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Camat Mangkutana Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026.

KEDUA : Perubahan atas lampiran Keputusan Camat Mangkutana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran ini.

KETIGA : Keputusan Camat Mangkutana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dijadikan acuan bagi seluruh unit kerja di Lingkup Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dalam pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mangkutana

pada tanggal : 22 Januari 2024

**CAMAT MANGKUTANA,**



 **ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

 Pangkat : Pembina

 Nip. : 19840710 201001 1 026

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

 KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 16 AHUN 2024

TANGGAL: 22 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DILINGKUNGAN KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Unit Organisasi : | Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur |
|  |
|  |
| 2. | Tugas Pokok : | Melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat |  |
| 3. | Fungsi : | a. | Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi pemerintahan umum |  |
|  |  | b. | Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |  |
|  |  | c. | Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi ketentraman dan ketertiban umum |  |
|  |  | d. | Perumusan kebijakan teknis, pemberian Dukungan, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Umum |  |
|  |  | e. | Pelaksanaan Tugas Kedinasan lain sesuai seksi dan tugasnya |  |

 4. Indikator Kinerja Utama

 Tujuan : Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan

 Mangkutana.

|  |  |
| --- | --- |
| Kode | Indikator Kinerja Utama/Uraian |
| 1.IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat Perzinan Non Usaha Merupakan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat skala Kecamatan.  Sumber data Nilai IKM Kecamatan. |

b. Sasaran 1 Tujuan 1

|  |  |
| --- | --- |
| Kode | Sasaran /Indikator Kinerja Utama |
| S.S.1 | Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.K.1 | Deskripsi |
|  | Indeks Kepuasan Masyarakat ditetapkan sebagai Indikator kinerja utama ke I (Pertama) karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang dilakukan setiap semester ditahun berjalan, cara melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dengan komponen penilaian :* + - * Kerapian Pakaian petugas
			* Penampilan petugas
			* Pelayanan prima petugas
			* Penjelasan informasi petugas
			* Cara berkomunikasi petugas
			* Sikap tanggap petugas
			* Keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan
			* Pelayanan yang diberikan adil
			* Petugas mampu melayani tepat waktu
			* Pelayanan yang cepat
			* Sikap petugas
			* Petugas memberikan perhatian kepada pelanggan
			* Keamanan dilingkungan Kantor
			* Kenyamanan dilingkungan pelayanan

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah dilaksanakanoleh unit pelayanan publik secara periodik.2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalampenyelenggara pelayanan publik.5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.6. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.7. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam Upayapeningkatan kinerja pelayanan.8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan  Di kantor Kecamatan Mangkutana9. Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Mangkutana. |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Cara Menghitung: |
|   | METODE PENGOLAHAN DATA |
|   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing pelayanan. Dalam hitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan. Dalam perhitungan kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki pertimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut: |
|   |  |
|   | **Jumlah Bobot = 1 = N** |
|   | **Bobot Nilai Tertimbang = Jumlah Unsur N**  |
|   |  |
|   | **Jumlah Bobot = 1 = 0,71** |
|   | **Bobot Nilai Tertimbang = Jumlah Unsur 14**  |
|   |  |
|   | Untuk memperoleh nilai SKM Unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata- rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :**IKM** = x Nilai Penimbang |
|   |  Total dari Nilai Persepsi Per Unsur |
|   |  Total Unsur yang Terisi |
|   |   |
|   |   |
|   | Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut : |
|   | **IKM Unit Pelayanan x 25** |
|   | Unit Bertanggung jawab |
|   | Seksi Pelayanan Umum seksi PMD seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan ketertiban |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA UTAMA** | **SATUAN** | **FORMULASI** | **TARGET KINERJA** | **SUMBER DATA** | **PENANGGUNG JAWAB** |
|  |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |   |   |  |
|  |
|   | Meningkatnya kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Mangkutana |   |   |   | 78,21 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( Kuisioner ) Terhadap pelayanan kepada masyarakat | Seksi pemerintahan, Seksi PMD, Seksi Pelayanan Umum dan seksi ketentraman ketertiban umum |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   | **IKM = Total dari Nilai** |  |
|   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |   | **Persepsi Per Unsur** |  |
| 1 |  | Nilai | **Total Unsur yang terisi di kali 100** |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |



 Ditetapkan di : Mangkutana

 Pada Tanggal : 22 Januari 2024

 CAMAT MANGKUTANA

**ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST**

Pangkat : Pembina

 Nip. : 19840710 201001 1 026